

Inflasi Sultra Tercatat Terendah Ketiga Secara Nasional, Pj. Gubernur Apresiasi Kerja Keras Tim TPID

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil mencatatkan angka inflasi yang terendah ketiga di tingkat nasional pada September 2024, dengan angka inflasi year-on-year (yoy) sebesar 1,06 persen. Prestasi ini menunjukkan kesuksesan Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Andap Budhi Revianto dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama harga-harga barang dan kebutuhan pokok. (3/10)

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, 1 Oktober 2024, inflasi Sultra menempati urutan ketiga di Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Lebih lanjut, angka inflasi Sultra ini berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto memberikan apresiasi terhadap upaya seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi di Sultra. "Penurunan inflasi ini adalah hasil kerja keras kita semua dalam menjaga kestabilan harga, meski tantangan ekonomi masih terus ada. Kami tetap mewaspadaikan fluktuasi harga, terutama yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat," ujar Andap dalam keterangan resminya.

Dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,62 persen, inflasi Sultra mengalami penurunan sebesar 0,56 persen. Penurunan ini disebabkan oleh deflasi bulanan sebesar -0,20 persen month-to-month (mtm) pada September 2024. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga signifikan antara lain cabai rawit, terong, beras, ikan layang, dan bayam.

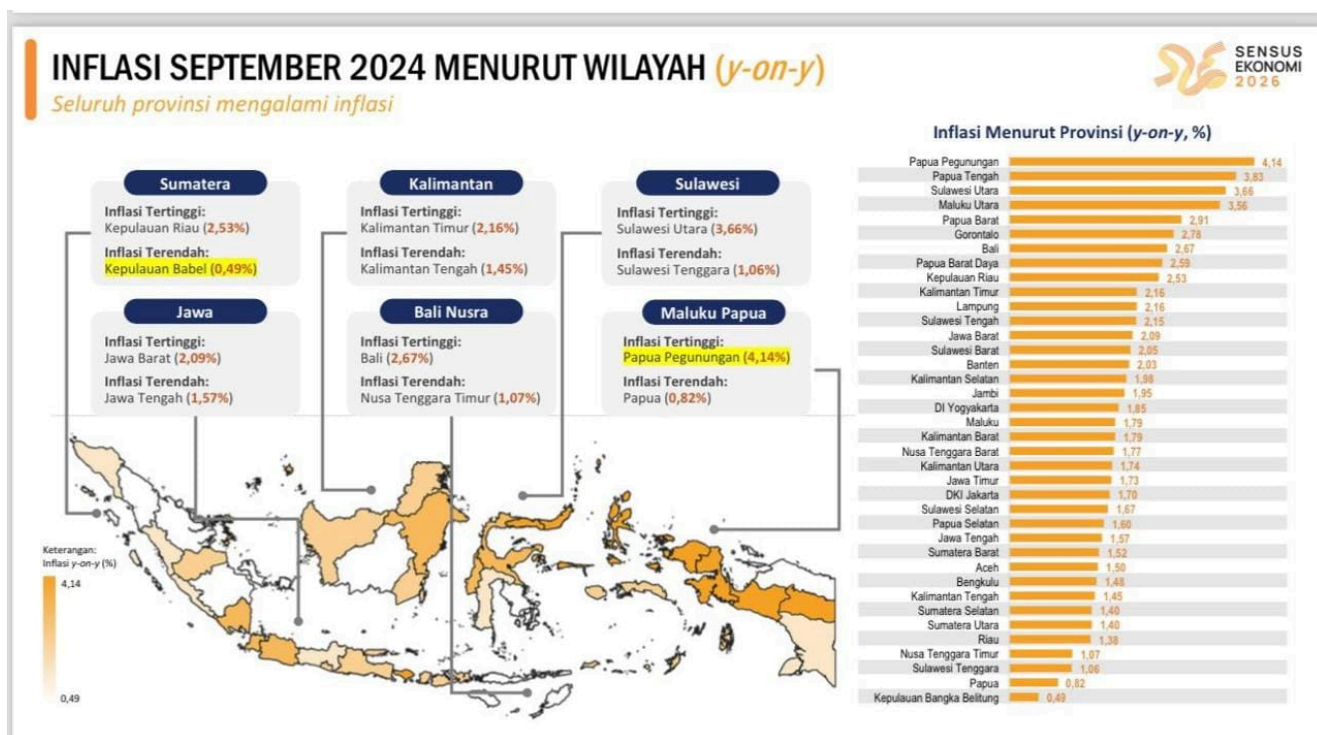
Meski demikian, inflasi tahunan tetap dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas, seperti sigaret kretek mesin (SKM), beras, mobil, gula pasir, dan emas perhiasan. Kenaikan harga-harga tersebut menyumbang inflasi sebesar 0,68 persen terhadap total inflasi Sultra.

Di tingkat kabupaten/kota, Kolaka mencatat inflasi tahunan tertinggi di Sultra dengan angka 1,74 persen, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, ikan bolu, dan sigaret kretek mesin. Sementara itu, Konawe menjadi kabupaten dengan inflasi terendah, hanya mencatatkan angka 0,43 persen.

Berikut adalah rincian inflasi tahunan di beberapa kabupaten/kota di Sultra:

- **Kendari:** 0,43 persen yoy, dengan deflasi bulanan sebesar -0,29 persen mtm
- **Baubau:** 1,13 persen yoy, dengan deflasi bulanan sebesar -0,29 persen mtm
- **Kolaka:** 1,74 persen yoy, dengan inflasi bulanan sebesar 0,06 persen mtm
- **Konawe:** 0,43 persen yoy, dengan deflasi bulanan sebesar -0,12 persen mtm

Selain inflasi, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di beberapa kabupaten juga tercatat stabil. Kabupaten Muna mencatatkan IPH tertinggi sebesar 0,81 persen, sementara Kolaka Timur mencatat IPH terendah dengan -1,64 persen.



Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto mengingatkan agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh kabupaten/kota di Sultra tetap waspada terhadap pergerakan harga di pasar, khususnya menjelang akhir tahun ketika permintaan barang diperkirakan meningkat. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antar

pihak terkait untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan mencegah lonjakan harga yang signifikan.

“Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, TPID, dan seluruh pihak terkait sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi di Sultra,” kata Pj. Gubernur.

Silaturahmi di Desa Pulau Tambako, Paslon Berani Disambut Ratusan Warga

Bombana, sultranet.com - Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bombana, H. Burhanuddin dan Ahmad Yani (BERANI), disambut hangat oleh ratusan warga dalam acara silaturahmi di Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (3/10/2024) tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai elemen warga yang antusias menyambut kedatangan calon pemimpin mereka.

H. Abustam, mantan Ketua DPRD Bombana yang kini secara terbuka mendukung Paslon BERANI, dalam pidatonya menegaskan bahwa Burhanuddin adalah figur pemimpin yang telah terbukti membawa perubahan besar selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bombana.

“Dalam waktu 15 bulan, Burhanuddin telah menunjukkan kepemimpinannya yang efektif. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk ragu, Burhanuddin harus didukung penuh pada Pilkada yang akan datang,” tegas Abustam di hadapan warga.

Selain Abustam, Politisi PAN, Andi Firman, juga turut memberikan dukungannya kepada Paslon BERANI. Menurutnya, Desa Pulau Tambako dan wilayah Mata Oleo selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintahan sebelumnya.

Ia menyatakan bahwa Burhanuddin dan Ahmad Yani memiliki visi kuat untuk memperbaiki infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

“Mata Oleo butuh perubahan besar, dan hanya Paslon BERANI yang bisa mewujudkan hal itu,” ujar Firman dengan penuh semangat.

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat warga Pulau Tambako. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa Bombana menuju arah yang lebih baik, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian.

“Kami hadir di sini untuk melayani masyarakat, bukan sekadar berkuasa. Kami ingin membangun Bombana secara adil dan merata,” kata Burhanuddin.

Suasana di Desa Pulau Tambako semakin meriah dengan antusiasme warga yang menyampaikan berbagai harapan dan aspirasi mereka kepada Paslon BERANI.

Banyak warga berharap agar akses jalan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan di daerah mereka dapat diperbaiki jika Burhanuddin terpilih.

Silaturahmi ini menjadi ajang bagi Burhanuddin dan Ahmad Yani untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi oleh warga Desa Pulau Tambako.

Mereka berjanji akan bekerja keras untuk memenuhi harapan warga dan memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Bombana.

Acara silaturahmi ini menegaskan semakin kuatnya dukungan terhadap Paslon BERANI dalam menghadapi Pilkada Bombana 2025.

Dengan visi perubahan yang mereka bawa, Burhanuddin dan Ahmad Yani diharapkan mampu membawa Bombana ke arah yang lebih baik dan memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan.

Politisi Senior Partai Gerindra Terang-terangan Dukung Paslon BERANI, Ini Alasannya

BOMBANA, Sultranet.com - H. Abustam, politisi senior Partai Gerindra dan mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Dapil Bombana-Konawe Selatan, secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon (paslon) Burhanuddin dan Ahmad Yani (BERANI) dalam Pilkada Bombana 2024.

Padahal, pada pemilihan kali ini, Partai Gerindra mendukung calon lain. Namun, H. Abustam memilih berbeda sikap dengan partainya.

Dalam acara kampanye yang berlangsung di Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo, pada Kamis (3/10), H. Abustam menyampaikan alasannya mendukung paslon Burhanuddin dan Ahmad Yani.

Ia menilai bahwa perubahan yang diinginkan masyarakat Bombana hanya bisa diwujudkan melalui kepemimpinan Burhanuddin, yang menurutnya telah membuktikan kapasitasnya selama menjabat sebagai Bupati Bombana meskipun hanya dalam waktu singkat.

“Saya berdiri di sini, di hadapan bapak ibu sekalian, bukan sebagai wakil dari partai, tetapi sebagai pribadi yang ingin perubahan nyata di Bombana. Apa yang telah dilakukan Pak Burhanuddin selama 15 bulan memimpin sangat nyata. Dia mampu mengubah wajah Bombana,” ujar H. Abustam dalam orasinya.



Warga Desa Pulau Tambako Deklarasi Dukong BERANI

Menurutnya, meskipun Gerindra mendukung calon lain, ia merasa bahwa dukungannya kepada Burhanuddin dan Ahmad Yani adalah bentuk tanggung jawab moral untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Bombana.

Abustam juga menyatakan keyakinannya bahwa paslon BERANI memiliki kapasitas untuk memimpin dan memajukan Bombana ke arah yang lebih baik.

“Selama 10 tahun terakhir, kita tidak melihat perubahan yang signifikan di Bombana. Namun, dalam 15 bulan Pak Burhanuddin memimpin, banyak kemajuan yang telah dirasakan masyarakat. Itu sebabnya saya memilih untuk mendukung beliau,” tegasnya.

H. Abustam juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang selalu hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan kebutuhan rakyatnya.

Menurutnya, Burhanuddin adalah sosok pemimpin ideal yang peduli dan bekerja keras untuk masyarakat Bombana.

“Pak Burhanuddin selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, dan itu yang kita butuhkan. Seorang pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga melayani dengan hati,” ujarnya.

Di akhir pidatonya, H. Abustam mengajak seluruh masyarakat Bombana untuk

bersatu mendukung paslon BERANI demi masa depan yang lebih baik.

Ia juga meminta kepada tim dan pendukungnya untuk bekerja keras memenangkan paslon Burhanuddin dan Ahmad Yani dalam Pilkada Bombana yang akan digelar pada November 2024.

Pemkab Kolot Dzikir dan Doa Bersama untuk Pilkada Aman dan Damai

KOLAKA UTARA, Sultranet.com - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kolaka Utara tahun 2024, Pemerintah Daerah Kolaka Utara (Kolut) menggelar dzikir dan doa bersama di Masjid Agung Bahrur Rasyad Al Ittihad, Lasusua, pada Kamis (3/10) malam. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, hingga penyelenggara pemilu.

Kegiatan dzikir dan doa yang diprakarsai oleh Pj. Bupati Kolaka Utara, Yusmin, bertujuan untuk memohon keberkahan kepada Allah SWT agar Pilkada Kolut berjalan dengan aman dan damai. Dalam sambutannya, Yusmin menyampaikan bahwa upaya maksimal dari berbagai pihak belumlah cukup tanpa disertai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Kita sudah bekerja keras, tapi kita juga harus memohon kepada Allah SWT agar Pilkada ini bisa berjalan dengan aman, damai, dan sesuai harapan kita semua,” ujar Yusmin.

Dzikir dipimpin oleh salah seorang pengasuh pondok tahfidz di Kolaka Utara, sementara doa bersama dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kolaka Utara, Dr. Hiabullah. Dalam momen ini, Yusmin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama demi kesuksesan Pilkada 2024.

Lebih lanjut, Yusmin juga menegaskan pentingnya kerjasama antara pihak penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi ini akan menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar.

“Kita semua harus menjaga netralitas, bekerja sama, dan menjaga agar tidak ada pihak yang merusak kedamaian di Kolaka Utara selama proses Pilkada berlangsung,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga suasana kondusif, Yusmin telah menginstruksikan agar kegiatan serupa dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kolaka Utara.

Hal ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat luas dalam memohon doa untuk kelancaran Pilkada serta terpilihnya pemimpin terbaik yang mampu membawa kemajuan bagi Bumi Patowonua.

“Kita berharap bupati yang terpilih nanti benar-benar yang terbaik dan mampu memberikan yang terbaik pula bagi masyarakat,” pungkasnya.

Yusmin juga mengungkapkan harapannya agar Pilkada Kolaka Utara 2024 bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian selama proses pemilu berlangsung.

Sumber: Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara

Kampanyekan Calon, ASN PPPK di Muna Terancam Sanksi Pidana

Pemilu

MUNA, Sultranet.com - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial R, yang juga merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna, diduga terlibat dalam kampanye mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muna, Bachrun Labuta - La Ode Asrafil.

Dugaan ini muncul setelah R diduga mengarahkan warga untuk mendukung Paslon tersebut dalam sebuah acara syukuran warga di Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Temuan ini pertama kali dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Bone dan segera dilimpahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna untuk ditindaklanjuti.

“Saya sudah melimpahkan temuan ini ke Bawaslu dan saat ini sedang dalam proses. Untuk lebih jelasnya, silakan konfirmasi ke Bawaslu,” ujar Ketua Panwascam Bone, Andi Hasan, pada Kamis (3/10/2024).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Muna, Mustar, membenarkan bahwa kasus ini sedang diproses. Menurutnya, dugaan pelanggaran oleh ASN R sangat kuat karena terdapat bukti berupa rekaman video yang menunjukkan R mengarahkan warga untuk mendukung Paslon Bachrun-Asrafil.

“Temuan ini sudah kami proses bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), karena dugaan pelanggarannya jelas. R yang merupakan ASN PPPK di Pemda Muna juga tercatat sebagai calon legislatif (Caleg) dari salah satu partai politik, sehingga kasus ini mengarah pada pidana pemilu,” kata Mustar.

Ia menambahkan bahwa pelanggaran tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pasal 71 ayat 1 yang melarang pejabat negara, ASN, anggota TNI/Polri, dan kepala desa untuk melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Paslon.

“ASN R ini terlihat berdiri dekat dengan Paslon Bachrun-Asrafil dalam video tersebut, sambil berbicara melalui mikrofon dan mengeluarkan pernyataan yang

mendukung salah satu Paslon. Kasus ini jelas masuk dalam ranah pidana pemilu,” tegas Mustar.

Bawaslu Muna akan melanjutkan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

“Besok kami bersama Gakkumdu akan melakukan klarifikasi lebih lanjut dan memeriksa saksi-saksi,” tambahnya.

Dalam video yang beredar, R terlihat berbicara di acara syukuran warga dengan menyebut bahwa istri salah satu Paslon adalah keluarganya, serta memberikan pernyataan yang dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung.

PKB Yakini Rajiun-Purnama Harapan Baru Muna

MUNA, Sultranet.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna 2024 telah memasuki tahap penting. Lima pasangan calon resmi mendapatkan nomor urut masing-masing dalam pengundian yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasangan LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, yang populer dengan sebutan RahmaTnya Muna, mendapat nomor urut 2. Angka tersebut diyakini membawa keberuntungan dan makna filosofis.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tenggara, Jaelani, menegaskan bahwa partainya sejak awal telah memberikan dukungan penuh kepada pasangan Rajiun-Purnama.

Dukungan ini, menurutnya, adalah bentuk ikhtiar politik untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di Kabupaten Muna.

“Pasangan Rajiun dan Purnama merupakan kolaborasi antara birokrat

berpengalaman dan aktivis. Rajiun, yang pernah menjabat sebagai Bupati Muna Barat, sukses mengembangkan daerah otonomi baru tersebut. Mereka memiliki komitmen kuat untuk memajukan Kabupaten Muna,” ujar Jaelani dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut, Jaelani menyebutkan bahwa PKB melihat pasangan ini saling melengkapi dengan visi yang sama dalam memajukan berbagai sektor di Muna, terutama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks Desa Membangun (IDM).

“Tantangan di Muna masih cukup banyak, terutama dalam menurunkan angka pengangguran dan mewujudkan kebijakan yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Namun, kami yakin pasangan ini bisa membawa perubahan signifikan,” lanjutnya.

Jaelani juga mengajak seluruh kader dan simpatisan PKB untuk terus mendukung dan mensosialisasikan program-program pasangan Rajiun-Purnama secara santun dan damai selama masa kampanye Pilkada 2024.

“Semoga perjuangan mereka berjalan lancar dan membawa berkah sebagai harapan baru bagi kemajuan Muna. Mari kita menghadirkan cinta dalam Pilkada ini,” tutupnya

Tidak Terdata, Ratusan Tenaga Kesehatan Datangi BKPSDM Muna

Muna, Sultranet.com - Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Muna, provinsi Sulawesi Tenggara menggelar aksi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (3/10/2024).

Mereka memprotes tidak terdatanya nama mereka di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN), meskipun telah mengikuti pendataan pada tahun 2022.

Masalah ini muncul saat para Nakes hendak mendaftar sebagai Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang telah resmi dibuka.

Banyak dari mereka baru mengetahui bahwa nama mereka tidak tercantum ketika mencoba membuat akun pendaftaran.

“Saya buat akun untuk memastikan apakah saya terdata, tapi saat masuk, muncul keterangan bahwa saya tidak terdata pada instansi pemerintahan Kabupaten Muna, dan diarahkan untuk tahap II,” ujar seorang Nakes saat berdialog dengan Plt Kepala BKPSDM Muna.

“Saya tidak terima jika harus masuk di tahap II, karena saya sudah mengabdikan belasan tahun,” tambahnya.

Para Nakes yang hadir merasa kecewa dan datang untuk mengadukan nasib mereka, karena sekitar 250 orang sudah dinyatakan tidak terdata.

Wa Ode Almira, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Muna, menjelaskan bahwa pendataan memang telah dilakukan pada 2022, namun tidak semua yang terdata lolos verifikasi.

Salah satu syarat utama dari pusat adalah sumber dana yang digunakan harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dana BLU dan jasa kapitasi tidak dapat terakomodir.

“Namun, kami akan berkomunikasi dengan BKN terkait aduan para Nakes hari ini,” ucap Almira.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendaftaran PPPK terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama untuk yang namanya sudah masuk dalam database BKN, berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober. Sementara tahap kedua bagi yang tidak terdata, akan dibuka pada 17 November hingga 31 Desember.

Pemkab Kolaka Utara Luncurkan Program Makan Siang Gratis

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Yusmin, S.Pd., M.H., meluncurkan program Makan Siang Bergizi Gratis di Alun-Alun Lasusua, Kamis (3/10).

Inisiatif ini bertujuan menekan angka stunting di Bumi Patowanua, sekaligus mendukung agenda nasional yang digalakkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini akan berjalan selama empat bulan sebagai uji coba, menasar 2.025 anak yang akan menerima makanan bergizi tiga kali dalam seminggu.

Hingga Desember 2024, sebanyak 27 kali pemberian makanan direncanakan, dengan harapan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan stunting di Kolaka Utara.

Peluncuran program tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pelajar, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain pemberian makanan, acara dilanjutkan dengan penebaran benih ikan dan penanaman berbagai jenis sayuran.

Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus mendukung kelancaran program makan siang gratis.

Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Dr. Taupik, menjelaskan bahwa pemberian makanan bergizi ini dirancang untuk mengukur dampak langsung terhadap kesehatan anak-anak.

“Sebelum program dimulai, tim Dinas Kesehatan telah melakukan pengukuran berat badan dan lingkar perut anak-anak sasaran,” ungkapnya.



Peluncuran Program Makan Siang Gratis

Penjabat Bupati Yusmin turut menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian dan perikanan.

Pemda Kolaka Utara telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk penanaman sayuran dan pembenihan ikan, seperti nila dan bandeng, yang nantinya akan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

“Program ini dibiayai melalui APBD Perubahan 2024. Saat ini baru menjangkau 28 sekolah, namun Pemda berkomitmen untuk memperluas cakupan program di masa depan, agar semua anak di Kolaka Utara dapat menikmati makanan bergizi secara gratis,” kata Yusmin.

Tidak hanya fokus pada gizi, Pemda juga merencanakan penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis pada 2025.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban orang tua dan memastikan semua anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.

Program makan siang bergizi ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan generasi sehat dan kuat di Kolaka Utara, sekaligus

meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Sumber: Diskominfo Kolut

Loyalis RE Dukung Rahmatnya Muna, Kawal Netralitas Kades

MUNA, Sultranet.com - Dukungan politik dalam Pilkada Muna 2024 terus mengalir untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode Muhammad Rajiun Tumada - Purnama Ramadhan.

Salah satu loyalis Rusman Emba, Sirajuddin Haq S.Sos, yang lebih dikenal sebagai Adhyn Haq, menyatakan komitmennya mendukung Rahmatnya Muna.

Adhyn, yang selama dua periode menjadi pendukung Rusman Emba sebagai Bupati Muna, kini beralih mendukung Rajiun Tumada dengan alasan kuat.

“Kami ingin Muna dipimpin oleh sosok yang disiplin, adil, dan mampu menjunjung hak-hak masyarakat, terutama yang tinggal di pelosok desa,” ujarnya, Kamis (3/10/2024).

Sebagai bentuk komitmennya, Adhyn tidak hanya mendeklarasikan dukungan, tetapi juga membentuk satuan tugas (satgas) pemantauan netralitas kepala desa di Pilkada kali ini.

Satgas ini bertujuan memastikan kepala desa bersikap netral sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur pemilu dan pemerintahan desa.

“Kepala desa harus netral. UU Pemilu dan UU Desa sudah jelas melarang mereka memihak kelompok tertentu. Jika melanggar, ada konsekuensi pidana dan pemberhentian dari jabatan,” tegasnya.

Adhyn menekankan bahwa netralitas kepala desa sangat penting untuk menjaga

keutuhan dan kedamaian dalam proses Pilkada.

Menurutnya, sikap kepala desa yang condong ke salah satu calon dapat memicu konflik di masyarakat.

“Kami akan memastikan semua kepala desa mematuhi aturan dan tidak memihak. Jika ada yang melanggar, kami akan mengambil tindakan tegas,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses Pilkada hingga ke pelosok desa dan memastikan Bawaslu serta jajarannya bekerja optimal.

“Pilkada bukan sekadar mengganti bupati, melainkan menciptakan pemerintahan yang lahir dari pilihan rakyat tanpa tekanan dari pejabat manapun,” bebernya.

Adhyn juga mengajak semua pihak untuk menjaga Pilkada Muna tetap damai dan berkualitas.

“Mari kita bersama-sama menciptakan Pilkada yang bersih dan bebas dari intervensi kepala desa yang tidak netral,” pungkasnya.

Pemprov Sultra Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data 2024

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih penghargaan Anindhita Wistara Data 2024 dengan predikat “Baik” dalam kategori pengelolaan data statistik sektoral. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia setelah melalui evaluasi yang diikuti oleh 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten serta kota se-Indonesia. (3/10)

Sultra menempati peringkat keenam dengan nilai 2,90, setelah berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan data sektoral, termasuk implementasi Data Desa Presisi yang digagas oleh Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto. Penyerahan penghargaan ini berlangsung pada Kamis, 26 September

2024, di Hotel Grand Mercure, Jakarta, dan dihadiri oleh Kepala BPS, dengan penghargaan untuk predikat keempat hingga kedelapan diterima oleh Dinas Kominfo Sultra selaku Walidata.

Andap Budhi Revianto, dalam sambutannya, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian ini sebagai bukti keberhasilan koordinasi antarinstansi di Sultra dalam mengelola data yang akurat dan reliabel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan Dinas Kominfo untuk mewujudkan satu data Indonesia yang valid dan terintegrasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama, khususnya dalam pengembangan Data Desa Presisi. Harapan saya, ke depan Sultra bisa masuk dalam tiga besar penerima Anindhita Wistara Data pada tahun 2025,” ujar Andap.

Sultra menjadi salah satu dari delapan pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan ini, yang juga diberikan kepada DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta yang meraih predikat tertinggi dengan nilai masing-masing 3,48, 3,37, dan 3,34. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akurasi data sektoral yang berperan penting dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Sebagai langkah strategis, Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya penyusunan Perda Data Desa Presisi untuk mendukung pembangunan data sektoral yang valid. “Melalui penerapan Perda ini, kita harap pada 2025, Sultra bisa semakin mengukir prestasi di tingkat nasional dan menjadi contoh dalam pengelolaan data sektoral,” tambahnya.

Ke depan, Andap juga mengajak semua perangkat daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan data sektoral, serta mengoptimalkan anggaran statistik yang dapat memperkuat kinerja Dinas Kominfo dan dinas lainnya sebagai produsen data. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Andap berharap Sultra dapat terus meningkatkan kualitas data untuk kesejahteraan masyarakat.

Daftar Penerima Penghargaan Anindhita Wistara Data 2024:

1. DKI Jakarta (3,48)
2. Bali (3,37)
3. DI Yogyakarta (3,34)

4. Jawa Timur (3,08)
5. Jawa Barat (3,07)
6. Sulawesi Tenggara (2,90)
7. Bengkulu (2,87)
8. Sumatera Barat (2,87)

Keberhasilan Pemprov Sultra ini diharapkan menjadi motivasi bagi provinsi lain dalam memperbaiki pengelolaan dan akurasi data untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih baik.